Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

Politik Transaksional dan Moralitas Demokrasi: Studi Perilaku Pemilih Legislatif di Kabupaten Padang Pariaman

Wira Satria[1], Endang Sulastri[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
[2] Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
*Corresponding Email: wira7282762@gmail.com

Abstrak
Pemilihan umum merupakan mekanisme utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan wakil dan pemimpin secara langsung, bebas, jujur, serta adil. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai persoalan, salah satunya adalah menguatnya praktik politik transaksional dalam kontestasi pemilihan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk politik transaksional, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih, serta menganalisis dampaknya terhadap moralitas demokrasi di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang melibatkan penyelenggara pemilu, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, tim pemenangan, serta masyarakat sebagai pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik transaksional tidak terbatas pada pemberian uang kepada pemilih, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk penyaluran sembako, bantuan sosial, dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan, serta pemanfaatan hubungan kekerabatan dan jaringan patronase politik. Keberlangsungan praktik tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya literasi politik, kuatnya ikatan sosial, serta budaya patronase yang masih mengakar. Akibatnya, keputusan politik masyarakat lebih banyak didasarkan pada pertimbangan keuntungan jangka pendek daripada kualitas, integritas, dan program yang ditawarkan kandidat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, melemahnya akuntabilitas wakil rakyat, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, penegakan hukum kepemiluan yang lebih efektif, serta penguatan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi dalam membangun demokrasi yang lebih berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik.
Kata Kunci: Politik transaksional, perilaku pemilih, moralitas demokrasi, demokrasi lokal, Kabupaten Padang Pariaman.

Abstract
General elections constitute a fundamental mechanism for realizing popular sovereignty within a democratic system by enabling citizens to elect their representatives through a process that is free, fair, and transparent. Nevertheless, the consolidation of democracy in Indonesia continues to encounter significant challenges, particularly the persistence of transactional politics in legislative elections. This study seeks to examine the various forms of transactional political practices, identify the factors influencing voter behavior, and assess their implications for democratic morality in Padang Pariaman Regency. A qualitative descriptive approach was employed to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and an extensive review of relevant literature involving election administrators, traditional and community leaders, academics, campaign teams, and voters. The findings indicate that transactional politics extends beyond direct vote-buying and also encompasses the distribution of food packages, social assistance, financial support for community activities, and the strategic use of kinship networks and political patronage. These practices are sustained by a combination of economic vulnerability, limited political literacy, strong social ties, and deeply rooted patron-client relationships within the local community. Consequently, electoral decisions are frequently shaped by immediate material benefits rather than by careful consideration of candidates' competence, integrity, and policy agendas. Such conditions contribute to declining democratic quality, weakened accountability of elected representatives, and diminishing public trust in democratic institutions. Therefore, strengthening political education, improving the enforcement of electoral regulations, and reinforcing local cultural values are essential steps toward fostering a more ethical, accountable, and substantive democratic system.
Keywords: Transactional Politics, Voter Behavior, Democratic Morality, Local Democracy, Padang Pariaman Regency.

PENDAHULUAN

Demokrasi pada hakikatnya merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat. Pelaksanaan prinsip tersebut diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai mekanisme konstitusional untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara

langsung, bebas, jujur, serta adil. Dalam negara yang demokratis, pemilu tidak hanya menjadi sarana pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga mencerminkan kualitas partisipasi politik warga negara, legitimasi pemerintahan, serta tingkat akuntabilitas penyelenggara negara. Oleh sebab itu, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh integritas proses pemilu dan perilaku seluruh aktor yang terlibat di dalamnya.

Perjalanan demokrasi Indonesia sejak era Reformasi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dari aspek kelembagaan maupun meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun demikian, penguatan demokrasi substantif masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang terus muncul adalah praktik politik transaksional dalam setiap penyelenggaraan pemilu, terutama pada pemilihan anggota legislatif. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persaingan politik belum sepenuhnya dibangun melalui adu gagasan, kapasitas, dan program kerja, tetapi sering kali dipengaruhi oleh pertukaran manfaat yang bersifat material.

Politik transaksional dapat dipahami sebagai hubungan pertukaran antara kandidat dengan pemilih melalui pemberian uang, barang, bantuan sosial, ataupun bentuk keuntungan lainnya dengan tujuan memperoleh dukungan elektoral. Dalam praktiknya, strategi tersebut dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan peluang kemenangan, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat persaingan politik cukup tinggi. Akibatnya, orientasi kompetisi politik cenderung bergeser dari penawaran visi dan program pembangunan menuju distribusi sumber daya ekonomi yang bersifat jangka pendek.

Keberlangsungan politik transaksional tidak hanya dipicu oleh kepentingan kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik perilaku pemilih. Sebagian masyarakat masih memandang pemberian bantuan menjelang pemilu sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan dianggap sebagai bentuk perhatian dari calon kepada konstituennya. Persepsi tersebut menyebabkan keputusan memilih sering kali didasarkan pada manfaat yang diterima secara langsung dibandingkan dengan penilaian terhadap rekam jejak, integritas, maupun kemampuan kandidat dalam menjalankan fungsi representasi politik.

Dalam kajian ilmu politik, kondisi tersebut berkaitan dengan konsep klientelisme, yaitu pola hubungan patron-klien yang dibangun melalui pertukaran kepentingan antara elite politik dan masyarakat. Hubungan semacam ini umumnya berkembang pada masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi politik, serta belum optimalnya pelembagaan partai politik. Keadaan tersebut mendorong terbentuknya budaya politik pragmatis yang lebih mengedepankan keuntungan sesaat daripada kepentingan publik dan pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.

Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas. Kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh sistem nagari, hubungan kekerabatan, serta peran penting ninik mamak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Struktur sosial tersebut tidak hanya membentuk kehidupan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap perilaku politik masyarakat, termasuk dalam menentukan pilihan pada pemilihan legislatif. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian, perdagangan, dan pekerjaan informal turut menciptakan ruang yang memungkinkan berkembangnya praktik politik transaksional.

Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, warga Kabupaten Padang Pariaman berpegang pada falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), yang menempatkan nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan integritas sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Secara normatif, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi landasan moral dalam kehidupan politik. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepentingan pragmatis sering kali lebih dominan daripada nilai-nilai etis tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma budaya yang dianut masyarakat dengan praktik politik yang berlangsung selama proses pemilu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif politik transaksional, teori perilaku pemilih, dan teori moralitas demokrasi untuk menjelaskan bagaimana praktik politik transaksional berkembang, faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik masyarakat, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam membentuk perilaku pemilih serta kualitas representasi politik yang dihasilkan.

Keunikan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan fenomena politik transaksional dengan dimensi moralitas demokrasi dalam konteks budaya lokal Minangkabau. Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada politik uang sebagai strategi elektoral, kajian ini menempatkan nilai-nilai budaya sebagai salah satu variabel penting dalam memahami dinamika demokrasi lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai hubungan antara praktik politik transaksional, perilaku pemilih, dan moralitas demokrasi. Selain memberikan kontribusi akademik, hasil penelitian juga diharapkan menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, serta berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan strategi penguatan pendidikan politik dan membangun demokrasi yang lebih berintegritas, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengkaji secara komprehensif fenomena politik transaksional serta dampaknya terhadap moralitas demokrasi dalam perilaku pemilih pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai realitas sosial, pengalaman para aktor, serta makna yang melatarbelakangi munculnya praktik politik transaksional di tingkat lokal. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya memaparkan fakta empiris, tetapi juga menginterpretasikan keterkaitan antara aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi perilaku pemilih.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan karakteristik daerah yang masih mempertahankan sistem nagari, kuatnya hubungan kekerabatan, serta pengaruh nilai-nilai budaya Minangkabau dalam kehidupan politik masyarakat. Selain itu, wilayah ini menunjukkan dinamika politik lokal yang menarik, khususnya berkaitan dengan indikasi praktik politik transaksional pada pelaksanaan pemilihan legislatif, sehingga dinilai sesuai dengan fokus penelitian.

Penentuan informan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu memilih individu yang dipandang memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Informan meliputi penyelenggara pemilu, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, pengamat politik, calon anggota legislatif atau tim kampanye, serta warga yang memiliki hak pilih. Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga informasi yang diperoleh mencapai titik kejenuhan (data saturation), yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang relevan.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur sehingga peneliti memiliki keleluasaan untuk mengeksplorasi berbagai informasi sesuai perkembangan di lapangan. Untuk melengkapi hasil wawancara, peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap berbagai arsip, foto kegiatan, dokumen resmi, data statistik, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan dinamika politik di daerah penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi

lembaga penyelenggara pemilu, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai referensi lain yang mendukung pembahasan.

Analisis data dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi atau reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, serta menyederhanakan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah diorganisasikan disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mempermudah proses interpretasi dan identifikasi pola hubungan antartemuan. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan kajian teoritis sehingga diperoleh interpretasi yang utuh mengenai praktik politik transaksional beserta implikasinya terhadap moralitas demokrasi.

Untuk memastikan tingkat keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui pencocokan hasil wawancara dengan data dokumentasi dan hasil kajian pustaka. Di samping itu, peneliti juga melakukan **member checking** kepada beberapa informan guna mengonfirmasi kesesuaian hasil interpretasi dengan kondisi yang mereka alami. Penerapan prosedur tersebut diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, serta validitas temuan penelitian sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai praktik politik transaksional dan pengaruhnya terhadap moralitas demokrasi dalam perilaku pemilih legislatif di Kabupaten Padang Pariaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Praktik Politik Transaksional pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Padang Pariaman

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik politik transaksional masih menjadi salah satu pola yang digunakan kandidat dalam memperoleh dukungan pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Padang Pariaman. Praktik tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian uang tunai kepada pemilih, tetapi juga dilakukan dalam berbagai bentuk lain, seperti penyaluran paket sembako, bantuan sosial, dukungan dana bagi kegiatan keagamaan, bantuan untuk organisasi kemasyarakatan, hingga pembiayaan aktivitas kepemudaan. Pada beberapa kasus, bantuan tersebut telah diberikan jauh sebelum tahapan kampanye dimulai sebagai strategi membangun kedekatan emosional dan memperoleh simpati masyarakat.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa proses penyaluran bantuan umumnya tidak dilakukan secara langsung oleh calon legislatif. Sebaliknya, kandidat lebih banyak memanfaatkan peran tim sukses, tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat sebagai penghubung dengan pemilih. Strategi tersebut dinilai lebih efektif karena para tokoh lokal memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di tengah masyarakat sehingga mampu memengaruhi preferensi politik warga.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik transaksional di Kabupaten Padang Pariaman telah berkembang melampaui praktik jual beli suara secara langsung. Hubungan yang terbentuk lebih mencerminkan pola patronase politik, yaitu relasi timbal balik yang memanfaatkan kedekatan sosial, hubungan kekeluargaan, serta jaringan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep klientelisme yang menjelaskan bahwa dukungan politik sering dibangun melalui pertukaran berbagai bentuk manfaat antara aktor politik dan masyarakat.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Pemilih

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan masyarakat masih menerima praktik politik transaksional dalam pemilihan legislatif. Faktor pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat. Sebagian informan mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi

mendorong masyarakat memandang bantuan yang diberikan kandidat sebagai peluang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, keputusan politik sering kali dipengaruhi oleh manfaat ekonomi jangka pendek dibandingkan pertimbangan terhadap kualitas kepemimpinan ataupun program yang ditawarkan calon.

Faktor berikutnya berkaitan dengan tingkat literasi politik masyarakat. Masih rendahnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip demokrasi menyebabkan sebagian pemilih belum menyadari bahwa politik uang merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai demokrasi yang sehat. Bagi sebagian masyarakat, pemberian uang maupun bantuan dianggap sebagai bentuk kepedulian kandidat, sehingga praktik tersebut diterima sebagai sesuatu yang lumrah menjelang pemungutan suara.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan politik, aspek sosial budaya juga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dalam masyarakat Minangkabau, hubungan kekerabatan, penghormatan terhadap ninik mamak, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat masih menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pilihan politik. Rekomendasi dari figur-figur tersebut sering kali lebih menentukan dibandingkan penilaian terhadap visi, misi, maupun kapasitas calon legislatif.

Di samping itu, keberadaan jaringan patronase politik turut memperkuat berlangsungnya praktik politik transaksional. Kandidat memanfaatkan berbagai organisasi sosial, kelompok tani, majelis taklim, organisasi kepemudaan, dan komunitas nagari sebagai media untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Hubungan timbal balik yang telah terjalin melalui jaringan tersebut kemudian menjadi sarana efektif dalam memperoleh dukungan politik.

Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan rasional sebagaimana dijelaskan dalam teori pilihan rasional, tetapi juga dibentuk oleh interaksi faktor ekonomi, budaya, relasi sosial, dan kedekatan personal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat lokal.

Politik Transaksional dalam Perspektif Moralitas Demokrasi

Praktik politik transaksional memberikan konsekuensi yang cukup besar terhadap kualitas moral demokrasi di Kabupaten Padang Pariaman. Demokrasi yang idealnya menjadi ruang kompetisi gagasan, integritas, dan program pembangunan, dalam praktiknya bergeser menjadi arena pertukaran kepentingan yang lebih menonjolkan keuntungan material. Kondisi tersebut menyebabkan orientasi pemilih lebih diarahkan pada manfaat sesaat daripada pertimbangan terhadap kepentingan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Penelitian juga memperlihatkan bahwa praktik tersebut berdampak pada menurunnya kualitas partisipasi politik masyarakat. Banyak pemilih tidak lagi menjadikan rekam jejak, kompetensi, maupun kapasitas calon sebagai dasar utama dalam menentukan pilihan. Sebaliknya, besarnya manfaat yang diterima selama proses pemilu menjadi faktor yang lebih dominan. Situasi ini berpotensi menghasilkan wakil rakyat yang lebih berorientasi pada pengembalian biaya politik dibandingkan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Selain memengaruhi kualitas representasi politik, politik transaksional juga berimplikasi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Sebagian masyarakat mulai memandang pemilu sebagai aktivitas yang sarat transaksi antara kandidat dan pemilih, bukan sebagai mekanisme demokratis untuk memilih wakil rakyat yang mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara bertanggung jawab.

Apabila ditinjau dari perspektif etika politik, praktik politik transaksional bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta orientasi pada kepentingan umum. Demokrasi yang berkualitas seharusnya dibangun atas dasar kebebasan memilih tanpa adanya tekanan maupun imbalan material. Oleh sebab itu, semakin meluas praktik politik transaksional, semakin besar pula ancaman terhadap terwujudnya demokrasi yang substantif.

Peran Nilai-Nilai Budaya Minangkabau

Kabupaten Padang Pariaman memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat melalui falsafah **Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)**. Nilai tersebut menempatkan kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepentingan bersama sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Secara normatif, nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi moral untuk membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik politik belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pertimbangan ekonomi, hubungan patronase, serta ikatan kekerabatan masih sering mendominasi proses pengambilan keputusan politik masyarakat. Bahkan dalam beberapa situasi, tokoh adat maupun tokoh masyarakat ikut terlibat dalam proses mobilisasi dukungan melalui jaringan sosial yang mereka miliki.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa lembaga adat masih memiliki potensi strategis dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat. Tingginya legitimasi sosial yang dimiliki ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kesadaran politik sehingga masyarakat semakin kritis dalam menggunakan hak pilihnya.

Implikasi Penelitian terhadap Penguatan Demokrasi Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mengurangi praktik politik transaksional tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Pendekatan yang lebih komprehensif perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, serta revitalisasi nilai-nilai budaya lokal.

Penyelenggara pemilu diharapkan mampu memperluas program pendidikan politik agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan program kerja calon. Pada saat yang sama, partai politik juga perlu memperkuat proses kaderisasi sehingga kompetisi politik tidak lagi didominasi oleh kekuatan modal, melainkan kualitas sumber daya manusia yang diusung.

Pemerintah daerah bersama lembaga adat, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menginternalisasikan kembali nilai-nilai demokrasi yang selaras dengan falsafah **Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**. Penguatan nilai budaya tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif bahwa politik transaksional tidak hanya bertentangan dengan prinsip demokrasi, tetapi juga bertolak belakang dengan nilai moral masyarakat Minangkabau.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa praktik politik transaksional merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, penguatan demokrasi lokal memerlukan strategi yang terintegrasi melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan politik, penegakan hukum pemilu secara konsisten, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai landasan etika dalam kehidupan demokrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik politik transaksional masih menjadi salah satu fenomena yang mewarnai pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Padang Pariaman. Bentuk praktik tersebut tidak terbatas pada pemberian uang kepada pemilih, tetapi juga mencakup penyaluran sembako, bantuan sosial, dukungan terhadap berbagai kegiatan masyarakat, serta pemanfaatan jaringan kekerabatan, tokoh adat, tokoh agama, dan tim sukses sebagai sarana memperoleh dukungan politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kandidat dan pemilih berkembang ke arah pola patronase yang memanfaatkan kedekatan sosial dan budaya sebagai instrumen mobilisasi politik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberlangsungan politik transaksional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya tingkat

literasi politik, kuatnya ikatan sosial dalam kehidupan masyarakat, budaya patronase, serta belum optimalnya pelembagaan partai politik. Keterbatasan ekonomi mendorong sebagian pemilih lebih mengutamakan manfaat yang bersifat langsung dibandingkan melakukan penilaian terhadap kompetensi, integritas, maupun visi dan program calon legislatif. Akibatnya, perilaku memilih cenderung berorientasi pada kepentingan praktis sehingga kualitas partisipasi politik dalam proses demokrasi menjadi kurang optimal.

Dari perspektif moralitas demokrasi, praktik politik transaksional memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan demokrasi lokal. Fenomena ini tidak hanya melemahkan kualitas representasi politik dan akuntabilitas wakil rakyat, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Padahal, nilai-nilai budaya Minangkabau yang berlandaskan falsafah **Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)** mengandung prinsip kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepentingan bersama yang dapat menjadi fondasi etika dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, upaya memperkuat demokrasi memerlukan sinergi antara pendidikan politik yang berkelanjutan, penegakan hukum pemilu secara konsisten, penguatan kelembagaan partai politik, serta revitalisasi nilai-nilai budaya lokal agar proses demokrasi dapat berlangsung secara lebih berintegritas, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. (2025). *Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2025*. Padang Pariaman: BPS.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). *The American Voter*. Chicago: University of Chicago Press.

Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.

Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Row.

Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.

Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.

Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14, 289–310.

Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Magnis-Suseno, F. (2001). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhtadi, B. (2020). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Navis, A. A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Press.

Nursal. (2018). Budaya Politik Minangkabau dan Pemilu. *Jurnal Demokrasi*, 17(2), 127–142.

Popkin, S. L. (1991). *The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns*. Chicago: University of Chicago Press.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven: Yale University Press.

Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. New York: Cambridge University Press.
Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
Tocqueville, A. de. (1945). *Democracy in America*. New York: Vintage Books.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.